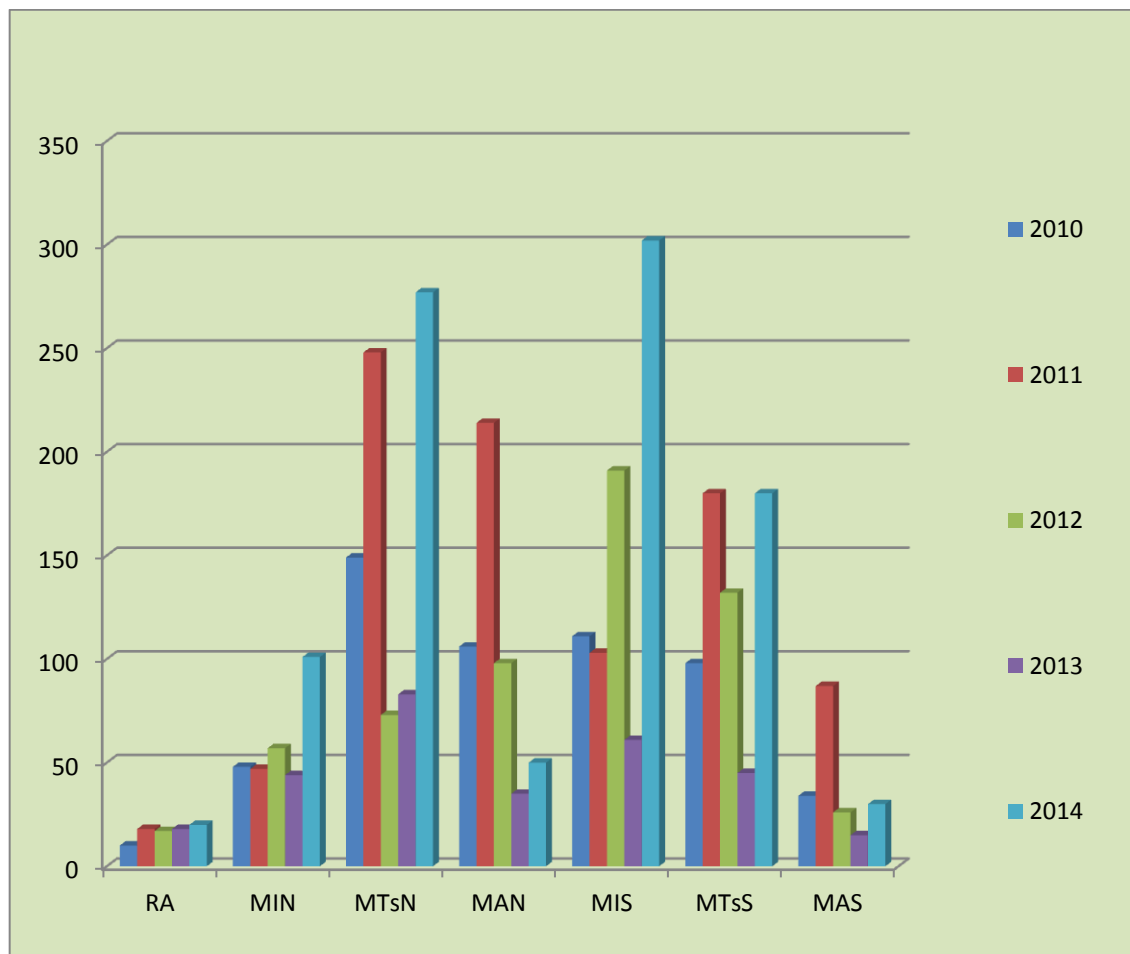


Tabel 1.30 Guru PNS Sudah Sertifikasi Tahun 2010 - 2014

NO	Tempat Mengajar	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL
1	RA	10	18	17	18	20	83
2	MIN	48	47	57	44	101	297
3	MTsN	149	248	73	83	277	830
4	MAN	106	214	98	35	50	503
5	MIS	111	103	191	61	302	768
6	MTsS	98	180	132	45	180	635
7	MAS	34	87	26	15	30	192
Jumlah		556	897	594	301	960	3.308

Grafik 1.4 Guru PNS Sudah Sertifikasi Tahun 2010 - 2014



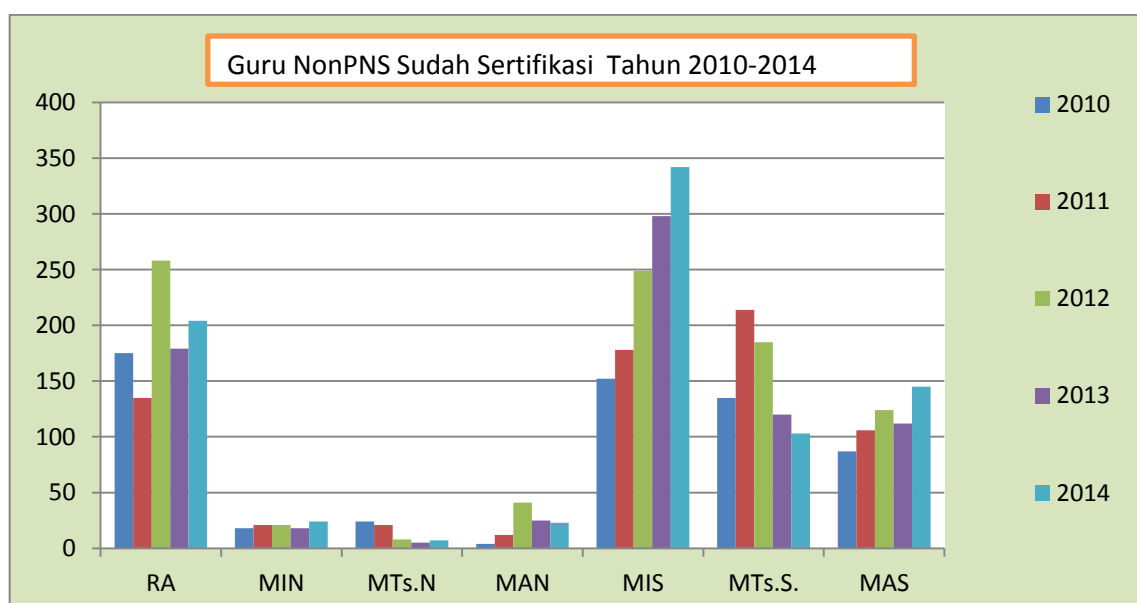
Tabel 1.31 Guru PNS Belum Sertifikasi Tahun 2010 - 2014

NO	Tempat Mengajar	TAHUN					TOTAL
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	RA	73	55	38	157	137	460
2	MIN	249	202	145	101	0	697
3	MTs.N	681	433	360	277	0	1.751
4	MAN	397	183	85	50	0	715
5	MIS	657	554	363	302	0	1.876
6	MTs.S.	537	357	225	180	0	1.299
7	MAS	158	71	45	30	0	304
Jumlah		2.752	1.855	1.261	1.097	137	7.102

Tabel 1.32 Guru Non PNS Sudah Sertifikasi Tahun 2010 – 2014

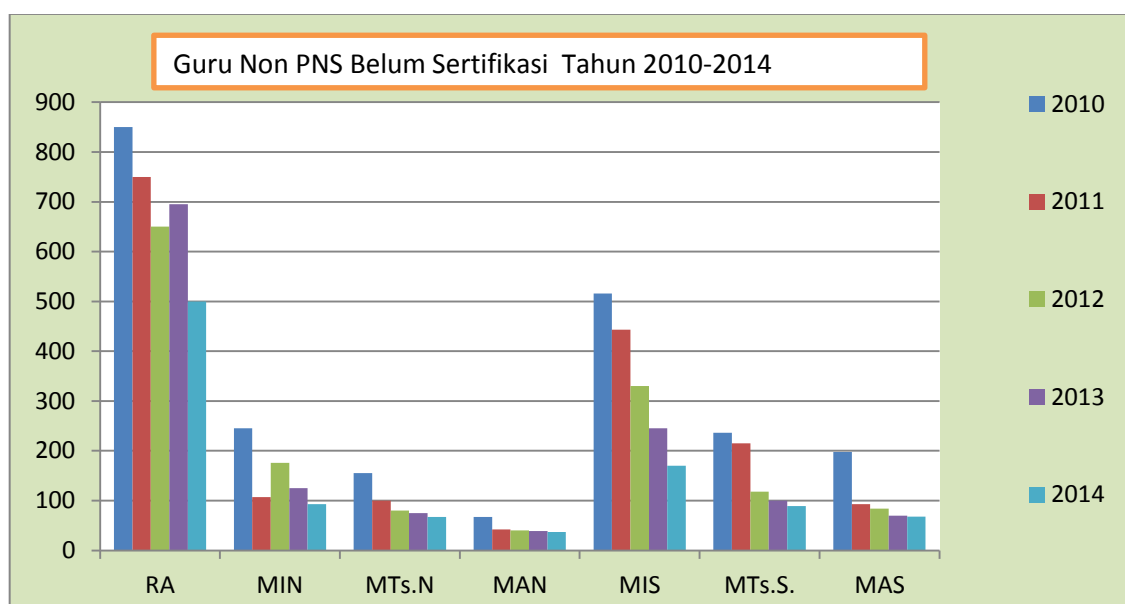
NO	Tempat Mengajar	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL
1	RA	175	135	258	179	204	951
2	MIN	18	21	21	18	24	102
3	MTs.N	24	21	8	5	7	65
4	MAN	4	12	41	25	23	105
5	MIS	152	178	249	298	342	1219
6	MTs.S.	135	214	185	120	103	757
7	MAS	87	106	124	112	145	574
Jumlah		595	687	886	757	848	3.773

Grafik 1. 5 Guru NonPNS Sudah Sertifikasi Tahun 2010-2014



Tabel 1.33 Guru Non PNS Belum Sertifikasi Tahun 2010 - 2014

NO	Tempat Mengajar	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL
1	RA	850	750	650	695	500	3.445
2	MIN	245	107	176	125	93	746
3	MTs.N	155	100	80	75	67	477
4	MAN	67	42	40	39	37	225
5	MIS	516	443	330	245	170	1.704
6	MTs.S.	236	215	118	100	89	758
7	MAS	198	93	84	70	68	513
Jumlah		2.267	1.750	1.478	1.349	1.024	7.868

Diagram 1.6 Guru Non PNS Belum Bersertifikasi Tahun 2010 - 2014

Hasil Ujian Nasional menjadi salah satu tolak ukur mutu madrasah dan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu satuan dan atau program pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang berikutnya, penentu kelulusan peserta didik dari program dan atau satuan pendidikan dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta jumlah siswa peserta ujian nasional berbanding lurus dengan jumlah siswa lulus ujian nasional. Selain itu nilai rata-rata ujian nasional mengalami fluktuasi naik turun pada MI, MTs dan MA dari tahun 2010 sampai dengan 2014 rincian sebagai berikut:

Tabel 1.34 Siswa Peserta Ujian Nasional Tahun 2010 - 2014

NO	NAMA	JUMLAH				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	MI	11.799	11.674	12.422	12.343	12.307
2	MTS	14.802	15.151	15.440	15.893	17.741
3	MA	4.659	4.575	4.817	4.774	5.218
JUMLAH		31.260	31.400	32.679	33.010	35.266

Tabel 1.35 Siswa Peserta Ujian Nasional Tahun 2015 - 2018

NO	NAMA	JUMLAH			
		2015	2016	2017	2018
1	MI	12.355	13.804	14.118	
2	MTS	20.137	20.595	20.788	21.171
3	MA BAHASA	99	167	187	170
4	MA IPA	1.903	2.298	2.395	2.672
5	MA IPS	318	3.727	3.817	3.993
6	MA AGAMA	583	616	695	806
JUMLAH		35.395	41.207	42.000	28.812

Tabel 1.36 Siswa Lulus Ujian Nasional Tahun 2010- 2014

NO	NAMA	JUMLAH				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	MI	11.797	11.674	12.422	12.343	12.307
2	MTS	14.798	15.151	15.440	15.893	17.739
3	MA	4.649	4.565	4.799	4.759	5.198
JUMLAH		31.244	31.390	32.661	32.995	35.244

Tabel 1.37 Siswa Lulus Ujian Nasional Tahun 2010 - 2014

NO	NAMA	JUMLAH				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	MI	11.797	11.674	12.422	12.343	12.307
2	MTS	14.798	15.151	15.440	15.893	17.739
3	MA	4.649	4.565	4.799	4.759	5.198
JUMLAH		31.244	31.390	32.661	32.995	35.244

Tabel 1.38 Nilai Rata-Rata Ujian Nasional Tahun 2010 - 2014

NO	NAMA	JUMLAH				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	MI	6,78	6,74	6,83	7,05	6,51
2	MTS	6,81	6,98	7,05	7,13	6,86
3	MA	6,64	6,67	6,91	6,64	6,92

Tabel 1.39 Nilai Rata-Rata Ujian Nasional Tahun 2014 - 2018

NO	NAMA	JUMLAH				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	MI	6,51	66,68	65,24	66,8	65,65
2	MTS	6,86	69,27	53,09	49,56	50,78
3	MA BAHASA	6,55	63,24	6,67	62,93	65,65
4	MA IPA	6,26	65,54	51,85	55,04	54,17
5	MA IPS	5,73	59,71	50,27	51,26	46,94

Terkait dengan peningkatan mutu madrasah sebagai lembaga yang memberikan layanan pendidikan, upaya yang telah dilakukan adalah memberikan bantuan upgrading akreditasi madrasah kepada madrasah-madrasah yang belum dan atau tidak terakreditasi untuk mencapai standar pelayanan minimal (SPM) dan atau standar nasional pendidikan (SNP) pada madrasah dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Terkait dengan peningkatan mutu madrasah sebagai lembaga yang memberikan layanan pendidikan, upaya yang telah dilakukan adalah memberikan bantuan upgrading akreditasi madrasah kepada madrasah-madrasah yang belum dan atau tidak terakreditasi. Adapun kendala madrasah terutama swasta tidak melaksanakan akreditasi antara lain mempunyai asumsi salah bahwa akreditasi dianggap berbayar padahal gratis, standar sarana madrasah swasta dibawah 60%, kendala tingkat pendidikan tenaga pendidik dan Tenaga kependidikan yang belum S1 dan tidak linier. Sebenarnya berdasarkan PMA No 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PMA No 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Madrasah, pemberian izin operasional tidak mewajibkan minimal luas lahan, minimal standar sarana sehingga mudah mengajukan uji akreditasi.

Berikut ini adalah data madrasah yang sudah terakreditasi dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mulai dari tingkat RA sampai dengan MA selama lima tahun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.40 Lembaga Pendidikan Terakreditasi Tahun 2010 - 2015

NO	NAMA	JUMLAH					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	RA.Terakreditasi- A	-	-	-	-	-	-
2	MIS Terakreditasi- A	1	9	6	-	18	18
3	MTs S Terakreditasi -A	-	9	2	7	23	23
4	MAS Terakreditasi -A	8	2	5	-	15	15
5	RA.Terakreditasi -B	-	-	-	-	-	-
6	MIS Terakreditasi - B	20	71	12	-	19	19
7	MTs S Terakreditasi -B	-	65	3	14	30	30
8	MAS Terakreditasi - B	11	8	2	-	9	9
9	RA.Terakreditasi - C	-	-	-	-	-	-
10	MIS Terakreditasi- C	4	14	3	-	3	3
11	MTs S Terakreditasi - C	-	2	1	2	1	1
12	MAS Terakreditasi - C	2	-	-	-	1	1
13	RA Belum Terakreditasi	-	-	-	-	-	-
14	MIS Belum Terakreditasi	-	-	-	-	-	-
15	MTs S Belum Terakreditasi	-	-	-	-	-	-
16	MAS Belum Terakreditasi	-	-	-	-	-	-

Tabel 1. 41 Lembaga Pendidikan Terakreditasi Tahun 2014 - 2018

NO	NAMA	JUMLAH				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	RA.Terakreditasi - A	0	0	2	10	-
2	MIS Terakreditasi - A	20	72	33	21	-
3	MTs S Terakreditasi -A	42	15	22	6	-
4	MAS Terakreditasi -A	33	11	3	5	-
5	RA.Terakreditasi -B	0	0	11	22	-
6	MIS Terakreditasi - B	20	75	55	43	-
7	MTs S Terakreditasi -B	32	22	47	8	-
8	MAS Terakreditasi - B	9	12	6	4	-
9	RA.Terakreditasi - C	0	0	2	2	-
10	MIS Terakreditasi - C	3	4	0	2	-
11	MTs S Terakreditasi - C	1	0	0	0	-
12	MAS Terakreditasi - C	0	0	0	0	-
13	RA Belum Terakreditasi	0	0	981	979	-
14	MIS Belum Terakreditasi	32	26	17	15	-
15	MTs S Belum Terakreditasi	29	18	10	8	-
16	MAS Belum Terakreditasi	1	1	1	1	-

1.1.6.1.2 Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah

Pendidikan Madrasah adalah garda terdepan untuk membentuk kualitas siswa yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Disamping itu membangun karakter peserta didik yang berakhlakul karimah.

Guna mewujudkan hal tersebut Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta menyusun inovasi dalam meningkatkan mutu kualitas pendidikan madrasah yaitu , meningkatkan kualitas, baik pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang semakin profesional serta memperbaiki sarana prasarana sehingga melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas tidak kalah dengan lulusan sekolah dibawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Program unggulan Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta tahun 2018-2019 anatara lain adalah :

1. Perbaiki mutu kualitas pelayanan terhadap madrasah di dalam bidang pendidikan madrasah dengan melaksanakan ISO 9001 tahun 2015 tentang Mutu Pelayanan, Digitalisasi tata persuratan, dan PPDB Online.
2. Menjalin kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta guna meningkatkan mutu kualitas madrasah berupa bantuan hibah Pemerintah Daerah Prov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018, didalam pengelolaan hibah tersebut kedua belah pihak mencanangkan peningkatan kualitas dan pengembangan Madrasah Negeri antara lain Ujian Kompetensi Guru, Pelatihan Kompetensi Guru, Tenaga kependidikan dan Siswa, perbaikan sarana dan prasarana *Information and Communication Technoligies* dimana madrasah harus punya Perpustakaan Digital dan *I- Board Optical Interactive Whiteboard* terutama Madrasah Aliyah Negeri.
3. Melaksanakan pemetaan potensi siswa dalam rangka bersaing dalam ajang Kompetensi Sains Madrasah yang akan dilaksanakan dalam tingkat nasional dengan mengadakan lomba lomba tingkat kota ataupun provinsi.
4. Melaksanakan Mandatory Prioritas Kementerian Agama Tahun 2018 antara lain Implementasi 8 Area Perubahan, Program Ngopi (Ngobrol Pendidikan Islam), Bina Kawasan dan Guru Kunjung, Mengaji (Mengasah Jati Diri Indonesia), dan E-Government.

Bidang pendidikan Madrasah Kantor Wilayah kementerian Agama Prov. DKI Jakarta dengan empat langkah inovasi tersebut diatas diharap mampu menjawab tantangan slogan Madrasah Hebat Madrasah Bermartabat.

1.1.6.1.3 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Pendidikan diniyah dan pondok pesantren merupakan lembaga swadaya masyarakat yang tidak hanya menyelenggarakan layanan Pendidikan semata tetapi juga pemberdayaan masyarakat dan pusat keagamaan Islam. Termasuk dalam layanan pendidikan keagamaan Islam adalah layanan pendidikan al-Qur'an.

Pada tahun 2018 jumlah Madrasah Diniyah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 561 lembaga yang memiliki SIOP dengan jumlah guru 2.888 guru di

antaranya menerima dana Hibah Kesra Pemda DKI Jakarta sebanyak 1.091 guru dan total santri 25.413.

Tabel 1.42 Rekapitulasi Data Madrasah Diniyah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

No	Wilayah	Lembaga	Guru	Guru Penerima KESRA	Santri
1	Jakarta Timur	184	987	401	8.167
2	Jakarta Barat	96	530	191	3.921
3	Jakarta Selatan	68	362	113	2.819
4	Jakarta Utara	110	568	271	5.558
5	Jakarta Pusat	92	356	109	3.578
6	Kep. Seribu	11	85	6	1.370
	Jumlah	561	2.888	1.091	25.413

Jumlah lembaga Taman Pendidikan Al-Quran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 1.454 lembaga yang memiliki SIOP dengan jumlah guru 5.439 dan total santri 64.173 santri.

Tabel 1.43 Rekapitulasi Lembaga TPQ Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

No	Wilayah	Lembaga	Guru	Santri
1	Jakarta Timur	427	3.137	15.412
2	Jakarta Barat	134	522	8.390
3	Jakarta Selatan	132	409	8.723
4	Jakarta Utara	617	941	22.877
5	Jakarta Pusat	83	293	7.728
6	Kep. Seribu	61	137	1.043
	Jumlah	1.454	5.439	64.173

Adapun tantangan yang dihadapi dari program kegiatan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) adalah peserta Ujian Akhir Madrasah (UAM) MDT setiap tahunnya hanya diikuti oleh 50 % dari jumlah santri yang ada. Hal ini dikarenakan santri peserta UAM lebih mengfokuskan diri pada ujian sekolah formal, yaitu dengan mengikuti Bimbingan Belajar yang waktunya bertepatan dengan aktivitas belajar mengajar MDT. Berbagai upaya telah dilakukan di antaranya dengan memberikan kelonggaran waktu jeda pelaksanaan UAM tersebut selama 2 minggu setelah pelaksanaan Ujian Nasional berlangsung dan ini pun tidak berhasil sebagaimana yang diharapkan. Upaya lainnya dilakukan dengan

cara membuat draft Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Wajib Pendidikan Diniyah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai persyaratan masuk siswa SD memasuki jenjang SMP yang harus memiliki Sertifikat Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Tantangan Program lainnya adalah kegiatan Pekan Olahraga Santri Madrasah Diniyah (PORSADIN) yang berevent nasional masih belum diback up oleh anggaran resmi pemerintah.

Sedangkan pada lembaga TPQ di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta hambatannya adalah sulitnya membuat kurikulum bersama untuk melakukan Ujian Munaqosah Bersama karena di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini lembaga TPQ terbagi ke dalam 4 wadah binaan, yaitu Pokja TPQ, Riayatul Ummah, LPPTKA dan Cahaya Madani yang mereka fokus membesarkan wadah binaannya masing-masing.

Menyikapi permasalahan tersebut di atas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah melakukan upaya membentuk Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur'an (FKPQ) yang keanggotaan dan kepengurusannya dari keempat lembaga tersebut yang mempunyai tugas menyusun program bersama berskala dari tingkat kota hingga pusat, namun demikian forum ini masih kurang efektif karena tidak didukung oleh anggaran pemerintah.

Pondok Pesantren telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam memberikan layanan pendidikan keagamaan Islam. Jumlah Pesantren di DKI Jakarta Tahun 2018 sebanyak 132 lembaga dengan jumlah santri sebanyak 17.827 santri. Terdiri dari santri laki-laki 9.475 santri dan santri perempuan 8.352 santri

Dari total jumlah tersebut, sebanyak 12.044 merupakan santri mukim dan 5.783 santri nonmukim.

Adapun tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan Pondok Pesantren di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah :

1. Kondisi lahan yang terbatas;
2. Harga tanah yang mahal;
3. Diperlukan modal yang besar untuk membangun Pondok Pesantren

Tabel 1.44 Jumlah Pondok Pesantren dan Jumlah Santri Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018.

Uraian	Jakbar	Jaksel	Jakpus	Jaktim	Jakut	Kep1000	Jumlah
Pondok Pesantren	20	29	3	61	17	2	132
Jumlah Santri	4.472	6.972	106	4.501	1.707	69	17.827
Mukim	3.490	5.009	106	2.759	669	11	12.044
Non Mukim	982	1.963	0	1.742	1.038	58	5.783
Laki-Laki	2.419	3.528	44	2.657	799	28	9.475

Perempuan	2.053	3.444	62	1.844	908	41	8.352
-----------	-------	-------	----	-------	-----	----	-------

Tabel 1.45 Jumlah Tenaga Pengajar Pondok Pesantren DKI Jakarta Tahun 2018

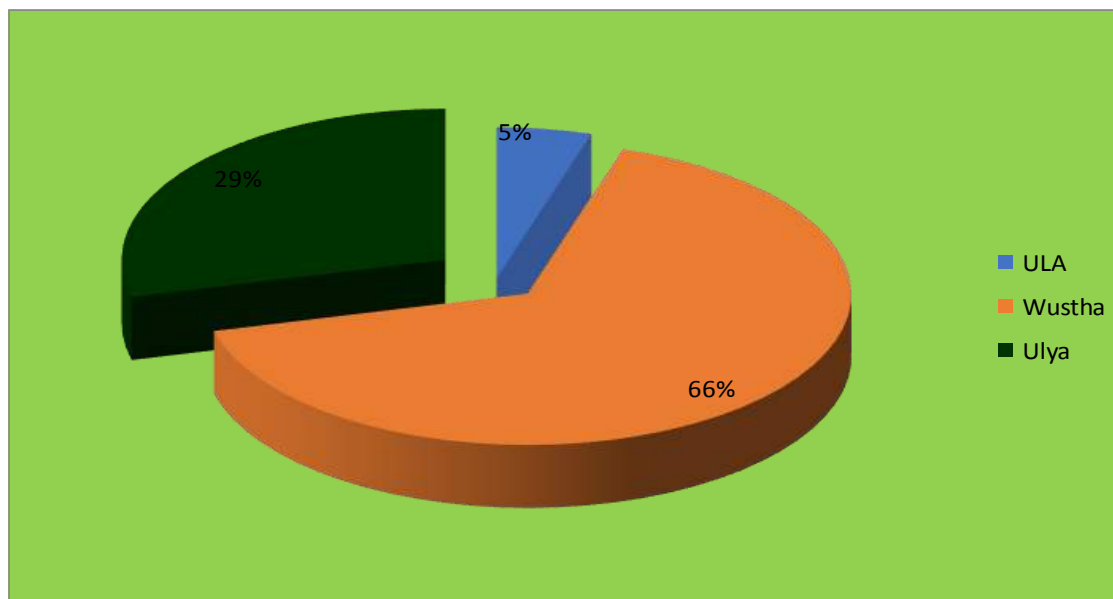
Pengajar	Jakbar	Jaksel	Jakpus	Jaktim	Jakut	Kep1000	Jumlah
Kyai/ Ustadz	669	530	29	531	160	10	1.929

Selain menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan, sebagian pesantren juga menyelenggarakan program Wajib Belajar 12 Tahun. Pada tahun 2018 jumlah pondok pesantren penyelenggara program Wajar 12 Tahun di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 7 pondok pesantren yang terletak di Kabupaten/Kota Jakarta Timur dan Jakarta Utara, terdiri atas penyelenggara Tingkat Ula sebanyak 2 pesantren, Tingkat Wustha sebanyak 2 pesantren dan Tingkat Ulya sebanyak 3 pesantren. Total jumlah santri program Wajar 12 Tahun sebanyak 1.230 santri, terdiri atas santri Tingkat Ula sebanyak 144 santri, Tingkat Wustha sebanyak 205 santri, dan Tingkat Ulyasebanyak 881 santri.

Tabel 1.46 Data Santri Wajar 12 Tahun Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SANTRI (TINGKAT)			JUMLAH
		ULA	WUSTHA	ULYA	
1	Jakarta Timur	112	192	868	1.172
2	Jakarta Utara	32	13	13	58
TOTAL JUMLAH		144	205	881	1.230

Diagram 1.2 Santri Wajar 12 Tahun Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta



tercapainya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti dan kemandirian bangsa yang kuat yang ditempuh melalui :

1. Peningkatan dan jumlah kapasitas guru;
2. Pemberian bantuan dan fasilitas ;
3. Pengembangan kurikulum dan metodologi pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang efektif dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI), kebijakan Kementerian Agama tahun 2014 – 2019 diarahkan pada peningkatan kualitas, Adapun target yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah: 1) tersedianya layanan PAI pada sekolah; 2) meningkatnya mutu layanan PAI pada sekolah; dan 3) meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama peserta didik. Strategi pencapaian yang digunakan antara lain melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana PAI pada sekolah, pembentukan dan peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI dan pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Pendidikan Agama Islam, peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar PAI, pengembangan standar model PAI pada sekolah serta peningkatan partisipasi dan kemitraan sekolah, masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Program lain terkait dengan pendidikan agama Islam pada sekolah adalah peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan pengawas PAI. Adapun target yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah: 1) meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama Islam; dan 2) meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama Islam. Adapun strategi yang digunakan antara lain melalui peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama Islam, penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya bagi guru, peningkatan wawasan guru melalui program pertukaran guru PAI, penyediaan subsidi tunjangan fungsional bagi guru PAI NonPNS dan penyediaan tunjangan profesi bagi guru PAI.

Pada Tahun Pelajaran 2017/2018 jumlah guru PAI di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 5.634 guru, terdiri atas guru PAI pada tingkat TK/PAUD sebanyak 1.140 guru, tingkat SD sebanyak 2.852 guru, tingkat SMP sebanyak 820 guru, dan tingkat SMA sebanyak 387 guru serta tingkat SMK sebanyak 435 guru.

Berdasarkan data PAI Tingkat dasar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut di atas ternyata masih terdapat permasalahan, yaitu :

1. Kekurangan anggaran TPG Non PNS yang berdampak pada terhutangnya pembayaran TPG guru PAI rata-rata 4 bulan setiap tahunnya;
2. Masih kurangnya tenaga guru Agama Islam;
3. Masih banyak guru PAI yang belum tersertifikasi.

Menyikapi permasalahan tersebut di atas telah dilakukan upaya peningkatan pelayanan Guru PAI pada sekolah umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

dengan melanjutkan pembayaran TPG Non PNS, mengusulkan pengangkatan Guru Agama Islam dan mengusulan calon peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Di samping itu kegiatan penunjang kesiswaan antara lain :

1. Pentas PAI (SD, SMP, SMA/SMK) Tingkat Kota/Kab. Provinsi dan Nasional;
2. ROHIS (SMA/SMK) Tingkat Kota/Kab. Provinsi dan Nasional;
3. Kegiatan Islam Rahmatan Lil Alamin bagi siswa SMA dan SMK;
4. Kegiatan Pesantren Kilat SD, SMP, SMA/SMK dan membangun kemitraan dengan GPAI melalui Forum Komunikasi Guru TK (FKGTK), KKG PAI SD, MGMP PAI SMP dan SMA/SMK.

Tabel 1.47 Jumlah Guru PAI Berdasarkan Tingkatan

No	Kota / Kabupaten	Jumlah Guru PAI				
		TK	SD	SMP	SMK	Jumlah
1	Jakarta Pusat	176	305	71	111	663
2	Jakarta Barat	124	490	164	241	1.019
3	Jakarta Timur	337	939	261	204	1.741
4	Jakarta Selatan	359	726	187	172	1.444
5	Jakarta Utara	122	380	133	76	711
6	Kepulauan Seribu	22	12	4	3	41
	Jumlah	1.140	2.852	820	807	5.619

Tabel 1.48 Jumlah Guru PAI Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Kota / Kabupaten	Kualifikasi PAI				
		SLTA	S1	S2	S3	Jumlah
1	Jakarta Pusat	188	392	75	8	663
2	Jakarta Barat	126	795	85	13	1.019
3	Jakarta Timur	328	1.225	164	24	1.741
4	Jakarta Selatan	356	925	145	18	1.444
5	Jakarta Utara	105	551	45	10	711
6	Kepulauan Seribu	19	17	5	0	41
	Jumlah	1.122	3.905	519	73	5.619

Tabel 1.49 Jumlah Guru PAI Berdasarkan Sertifikasi

No	Kota / Kabupaten	Jumlah Guru PAI		
		Belum	Sudah	Jumlah
1	Jakarta Pusat	238	425	663
2	Jakarta Barat	495	524	1.019
3	Jakarta Timur	692	1049	1.741
4	Jakarta Selatan	587	857	1.444
5	Jakarta Utara	362	349	711
6	Kepulauan Seribu	18	23	41
	Jumlah	2.392	3.227	5.619

1.1.6.2 Pendidikan Agama Kristen

Tabel 1.50 Data Guru Agama Kristen

NO	GURU	JUMLAH				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	PNS	483	483	483	483	483
2	NON PNS	261	261	261	261	261
	JUMLAH	744	744	744	744	744

Peningkatan Kompetensi dan kualitas guru pendidikan agama Kristen tingkat Dasar dan Menengah telah dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru pendidikan agama Kristen pada tahun 2014 sebanyak 744 orang. Selain itu untuk meningkatkan pelayanan dan mutu guru pendidikan agama Kristen pada tahun 2014 persentase guru pendidikan agama Kristen yang telah bersertifikasi sebesar 85 %.

Kemudian pada Tahun 2014 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Tunjangan Fungsional pada Guru Non PNS Pendidikan Agama Kristen sebanyak 20 orang. Hal tersebut masih berbanding jauh dengan jumlah Guru Pendidikan Agama Kristen Non PNS yaitu sebanyak 261 orang.

1.1.6.3 Pendidikan Agama Katolik

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan Katolik selama lima tahun terakhir telah dilakukan sejumlah upaya melalui perluasan akses, peningkatan mutu dan pengembangan lembaga pendidikan agama dan keagamaan.

Peningkatan mutu guru pendidikan agama Katolik terlihat dari jumlah guru pendidikan agama Katolik yang sudah dilakukan sertifikasi pada tahun 2014 sebanyak 180 orang. Selain itu peningkatan mutu guru pendidikan agama katolik terlihat pada jumlah guru pendidikan agama katolik non PNS yang menerima Tunjangan Fungsional sebanyak 107 orang.

Tabel 1.51 Data Guru Agama Katolik Tahun 2010 - 2014

NO	GURU	JUMLAH				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	PNS	120	119	118	118	112
2	NON PNS	320	319	318	316	311
	JUMLAH	440	438	436	434	423

Data Guru Pendidikan Agama Katolik pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 1.52 Data Guru Agama Katolik Tahun 2015 - 2018

NO	GURU	JUMLAH			
		2015	2016	2017	2018
1	PNS	99	99	96	92
2	NON PNS	277	211	242	284
	JUMLAH	376	310	338	376

Guru Pendidikan Agama Katolik Non PNS yang berhak menerima tunjangan profesi baik yang sudah inpassing maupun yang belum inpassing pada Tahun 2018 sebanyak 145 orang.

Selain itu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga pendidikan. Jumlah penerima bantuan lembaga pendidikan pada tahun 2014 sebanyak 10 lembaga pendidikan.

1.1.6.4 Pendidikan Agama Hindu

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan peningkatan kualifikasi ijazah menjadi Sarjana/Diploma IV guru pendidikan Agama Hindu sebanyak 10 orang. Selain itu pada tahun 2014 sebanyak 11 orang Guru Pendidikan Agama Hindu telah bersertifikasi.

Tabel 1.53 Data Guru Agama Hindu Tahun 2010 – 2014

NO	GURU	JUMLAH				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	PNS	22	22	21	20	18
2	NON PNS	14	14	9	10	10
	JUMLAH	36	36	30	30	28

Tabel 1.54 Data Guru Agama Hindu Tahun 2015 - 2018

NO	GURU	JUMLAH			
		2015	2016	2017	2018
1	PNS	22	22	20	20
2	NON PNS	24	24	23	23
	JUMLAH	46	46	43	43

1.1.6.5 Pendidikan Agama Buddha

Dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan agama Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan bantuan pada tahun 2014 sebanyak 27 lembaga pendidikan keagamaan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan agama Buddha tahun 2015 – 2019 akan dilakukan berbagai upaya melalui pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan keagamaan. Peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan Buddha dilakukan dengan pelatihan/seminar, pemberian tunjangan/insentif bagi guru agama Buddha, bantuan sarana prasarana dan bantuan operasional lembaga pendidikan.

Jumlah Guru pendidikan agama Buddha pada tahun 2018 sebanyak 183 orang dengan rincian sebanyak 56 guru berstatus sebagai PNS dan sebanyak 127 guru berstatus Non PNS dan semua sudah tersertifikasi 100% sejak tahun 2014.

1.1.7 Peningkatan Kualitas Tatakelola Pembangunan Bidang Agama

Terciptanya tatakelola pemerintahan yang bersih merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya lembaga birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Sejumlah langkah telah ditempuh dalam upaya penguatan tatakelola pemerintahan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam lingkup tata kelola perencanaan program, kepegawaian dan keuangan.

1.1.7.1 Tata Kelola Perencanaan Program

Dalam rangka peningkatan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan program yang terkandung didalam dokumen perencanaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mulai melakukan restrukturisasi program dan anggaran sejak tahun 2010. Restrukturisasi dimaksud untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara efektif, efisien, terpadu, menyeluruh, berkeadilan, dan akuntabel dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan negara.

Secara keseluruhan, unit perencanaan pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab atas penyusunan 8 dokumen DIPA yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran.

Mekanisme penyusunan anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan sesuai dengan arahan Menteri Agama yaitu unit teknis bertugas untuk menyampaikan usulan anggaran sesuai dengan tugas fungsi, skala prioritas dan kegiatan yang diperlukan. Sedangkan Bagian Tata Usaha bertugas sebagai koordinator penyusunan anggaran dan kegiatan dengan memastikan bahwa usulan dari unit teknis telah disusun sesuai dengan peraturan teknis penyusunan anggaran dan telah sesuai dengan kebijakan pimpinan.

1.1.4.1 Tata Kelola Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan Tahun 2014 didukung oleh 9270 orang Pegawai Negeri Sipil yang memiliki berbagai kompetensi sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

Setelah dilakukan pembaharuan data maka data statistik jumlah pegawai berdasarkan jabatannya masing-masing pada tahun 2018 per 17 Juli 2018 sebagai berikut:

Tabel 1.55 Data Statistik PNS Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jabatan

SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta													
No	Unit Kerja	Jumlah	Jabatan										
			Struktural	Fungsional Umum	Analisis Kepegawaian	Arsiparis	Guru	Pengawas	Penghulu	Penyuluh	Perencana	Pranata Komputer	Pengelola Pengadaan Barang Jasa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta	243	41	196	2	0	0	0	0	2	1	0	1
2	Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat	1039	24	212	0	2	714	28	40	19	0	0	0
3	Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat	370	11	126	0	0	180	11	22	20	0	0	0
4	Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan	1897	21	332	0	1	1396	38	58	48	0	0	3
5	Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur	2723	33	479	1	2	2050	48	60	49	1	0	0
6	Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara	1255	14	185	0	1	974	19	22	39	0	1	0
7	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu	113	7	29	0	0	70	1	2	4	0	0	0
Jumlah		7640	151	1559	3	6	5384	145	204	181	2	1	4

Dalam proses pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupaya menggali secara mendasar potensi sumber daya manusia yang dimiliki melalui penanaman 5 (lima) budaya kerja yakni Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab dan Keteladanan dilakukan melalui kegiatan seminar, workshop, sosialisasi dan orientasi kepegawaian.

1.1.4.2 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan

Dalam menyusun Laporan Keuangan dilakukan empat strategi antara lain rekrutment tenaga akuntansi, penataan aset dan penyelamatan BMN, pembuatan sertifikat tanah bagi aset tanah yang belum ada bukti kepemilikannya, pengembalian aset-aset yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Dalam upaya menyajikan Laporan Keuangan yang layak, langkah-langkah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diantaranya adalah :

1. Melaksanakan sosialisasi, bimtek dan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal penyusunan Laporan Keuangan
2. Penunjukkan Duta Akrual SAIBA dan BMN dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan operator dalam menyajikan Laporan Keuangan dan dalam membangun koordinasi dengan operator sejawat dan unit terkait
3. Melakukan pengamanan aset khususnya aset tanah secara bertahap dengan melakukan proses sertifikasi tanah atas nama Kementerian Agama.

Sasaran strategis dalam hal Laporan Keuangan adalah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang selama ini sudah diraih oleh Kementerian Agama.

1.1.4.3 Inventarisasi, Revaluasi dan Penyelamatan Aset

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam kapasitas sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang sekaligus sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah mempunyai tanggung jawab untuk mengadministrasikan dan menyusun laporan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persoalan klasik yang dihadapi adalah pengadministrasian / pengelolaan dan pencatatan aset tidak bergerak berupa tanah, gedung dan bangunan. Dalam hal pengamanan aset tanah telah dilakukan beberapa hal diantaranya :

- 1, Pensertifikatan tanah atas nama Kementerian Agama secara bertahap baik dengan menggunakan anggaran APBN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun melalui koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Badan Pertanahan Nasional dalam Program Pemutihan Pensertifikatan Tanah Milik Negara.
2. Berkordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dalam hal ini Biro Keuangan dan BMN dan Biro Hukum dan KLN dalam rangka penyelesaian aset tanah dan bangunan yang dikuasai oleh pihak ketiga.
3. Berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka menjajaki kemungkinan hibah aset tanah milik Pemda yang digunakan untuk Madrasah dan KUA kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta .

1.1.4.4 Penataan Organisasi

Pengaturan organisasi Kementerian Agama saat ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama. Dalam pemerintahan negara, Kementerian Agama termasuk kementerian yang tidak diotonomikan, sehingga selain instansi pusat, Kementerian Agama memiliki instansi vertikal yang terdapat di daerah, dan unit pelaksana teknis (UPT), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Salah satu upaya penataan organisasi adalah melaksanakan penerangan madrasah-madrasah swasta menjadi madrasah negeri dimana permintaan sekolah plus agama semakin meningkat di masyarakat DKI Jakarta. Penerangan madrasah tersebut juga untuk memaksimalkan kualitas pelayanan madrasah dari sisi tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan. Masyarakat DKI Jakarta berbondong-bondong mendaftar kesana dikarenakan madrasah negeri merupakan sekolah plus agama negeri dibawah pembinaan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Selain itu upaya untuk penataan organisasi dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan mengadakan Asesmen di

Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk semua jenjang jabatan yaitu Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Eselon V (Kepala Urusan Tata Usaha), Kepala Madrasah Negeri dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. *The Right Man In The Right Place* adalah kebutuhan setiap organisasi dalam melakukan penataan. Jantung penataan organisasi adalah *Top Leader* yang dapat berjalan seiring dengan 5 unsur Budaya Kerja Kementerian Agama.

1.1.4.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan akses informasi kepada publik dalam bentuk pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang disajikan berupa informasi berbasis Website *dki.kemenag.go.id* sebagai media informasi internal yang dapat diakses oleh publik. Dalam perkembangannya, pemanfaatan TIK mendorong terwujudnya *e-government* dan mendukung Pembangunan Zona Integritas. Website *dki.kemenag.go.id* adalah wadah sistem informasi yang di dalamnya terintegrasi berbagai sistem informasi unit kerja, satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Salah satu dari aspek dukungan pada website Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta adalah berita kegiatan dari masing-masing unit kerja dan info layanan yang tersedia di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berencana mengembangkan website *dki.kemenag.go.id* yang akan terintegrasi dengan sosial media dalam bentuk akses informasi, layanan pengaduan dan informasi publik.

Selain website Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga memanfaatkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan telah berfungsi untuk memberikan dukungan pengadaan dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg), Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA), sementara itu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, maka telah dikembangkan sistem surat elektronik berbasis e-mail, sosial media *fb.com/Kantor WilayahagamaDKI*, dan *twitter.com/Kantor Wilayah_agamajkt* di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1.1.4.6 Implementasi Reformasi Birokrasi

Sebagai wujud peningkatan kualitas kinerja pegawai dan pelayanan publik, Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta telah menyusun pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh unit organisasi dan unit kerja. Di samping itu,